PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA UTARA



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

Tahun 2016 - 2021

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH & STATISTIK
Jl. Kawasan Pemerintahan – Tobelo
2019

KATA PENGANTAR

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda dan Statistik) Kabupaten Halmahera Utara sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Balitbangda dan Statistik Tahun 2016 -2021 sebagai bentuk realisasi dari penelitian dan perencanaan pembanguna kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Balitbangda dan Statistik ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara selama Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara karena dokumen Renstra menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Masukan dan saran konkrit untuk kesempurnaan dokumen ini sangat diharapkan. Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, kiranya Renstra ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun daerah ini kearah yang lebih baik.

Kepala Badan
Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik
Kabupaten Halmahera Utara

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 196911191997021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistimatika Penulisan 6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA DAN STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Balitbangda dan Statistik 8
2.2. Sumberdaya Balitbangda dan Statistik 12
2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda dan Statistik 22
2.4. Tantangan dan Peluang Balitbangda dan Statistik 27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BALITBANGDA DAN STATISTIK KABUPATEN HALAMHERA UTARA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda dan Statistik 29
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 37
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis 38
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Balitbangda dan Statistik 42

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45
BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN 48
BAB VII. INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA DAN STATISTIK DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 51
BAB VIII. PENUTUP 56
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Balitbangda dan Statistik Berdasarkan Esalon Jabatan 14
Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian balitbangda dan Statistik Berdasarkan Pendidikan Terakhir 17
Tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian Balitbangda dan Statistik Berdasarkan Esalon dan jenis Kelamin 18
Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian balitbangda dan Statistik Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 18
Tabel 2.5. Kebutuhan Pegawai Balitbangda dan Statistik Berdasarkan Tupoksi .. 19
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2016 – 2018 21
Tabel 2.7. Daftar Fasilitas Balitbangda dan Statistik 22
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Balitbangda dan Statistik Tahun 2011 – 2015 26
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Perioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Pelayanan Balitbangda dan Statistik 30
Tabel 3.2. Faktor Penghambat Pelayanan Balitbangda dan Statistik Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 34
Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Balitbang Provinsi Maluku Utara 35
Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda dan Statistik Terhadap Renstra Balitbangda Prov. Maluku Utara 36
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Dan Statistik 43
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Balitbangada dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara 46
Tabel 7.1. Indikator Kerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jumlah Pegawai Balitbangda dan Statistik per Bidang 13
Gambar 2.2. Jumlah Pegawai Balitbangda dan Statistik Berdasarkan Esalonisasi 13
Gambar 2.3. Jumlah Pegawai Balitbangda dan Statistik Berdasakan Golongan 15
Gambar 2.4. Jumlah dan Presentase Pegawai Balitbangda dan Statistik Per Golongan 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, yaitu " ***"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan"***. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD yang nantinya dijadikan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang baru terbentuk, mempunyai tugas dan fungsi yang strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di daerah ini melalui penelitian, pengembangan daerah dan statistik.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda dan Statistik) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Balitbangda dan Statistik untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 2016 - 2021, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan lima tahun mendatang sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik.

Perubahan Renstra Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara ini disusun berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021 yang menjadi acuan bagi program dan kegiatan selama lima tahun yang bersifat indikatif yang kemudian di jabarkan dalam Rencana Kerja Balitbang dan Statistik dalam pelaksanaan pembangunan tahunannya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang; Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021.

14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dn Fungsi Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen renstra merupakan acuan dan arahan bagi Perangkat Daerah Balitbangda dan Statistik dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan yaitu : penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, analisis, perekayasaan dan pengoperasian di Kabupaten Halmahera Utara periode 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis.

Perubahan Renstra Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 ini disusun dengan tujuan:

1. Tersedianya Dokumen Renstra Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman penyusunan dokumen Renja dan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan Perangkat Daerah Balitbangda dan Statistik;
2. Menjamin kerterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Menjamin terbentuknya sistem inovasi daerah (SIDa) dan penguatan SIDa dalam mendukung percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara
4. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian (kelitbangan) pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA & STATISTIK

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2016 – 2021 serta tantangan dan peluang pengembangan Balitbang dan Statistik.

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BALITBANGDA & STATISTIK

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Balitbangda & Statistik, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV . TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam periode Tahun 2017-2021.

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017-2021.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Balitbangda dan Statistik

Berdasarkan Perda No : 44 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Statistik di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan statistik pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan dan statistik pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik di pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Utara;
    1) Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
    2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik di Kabupaten Halmahera Utara;
    3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
    4) Pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan statistik daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

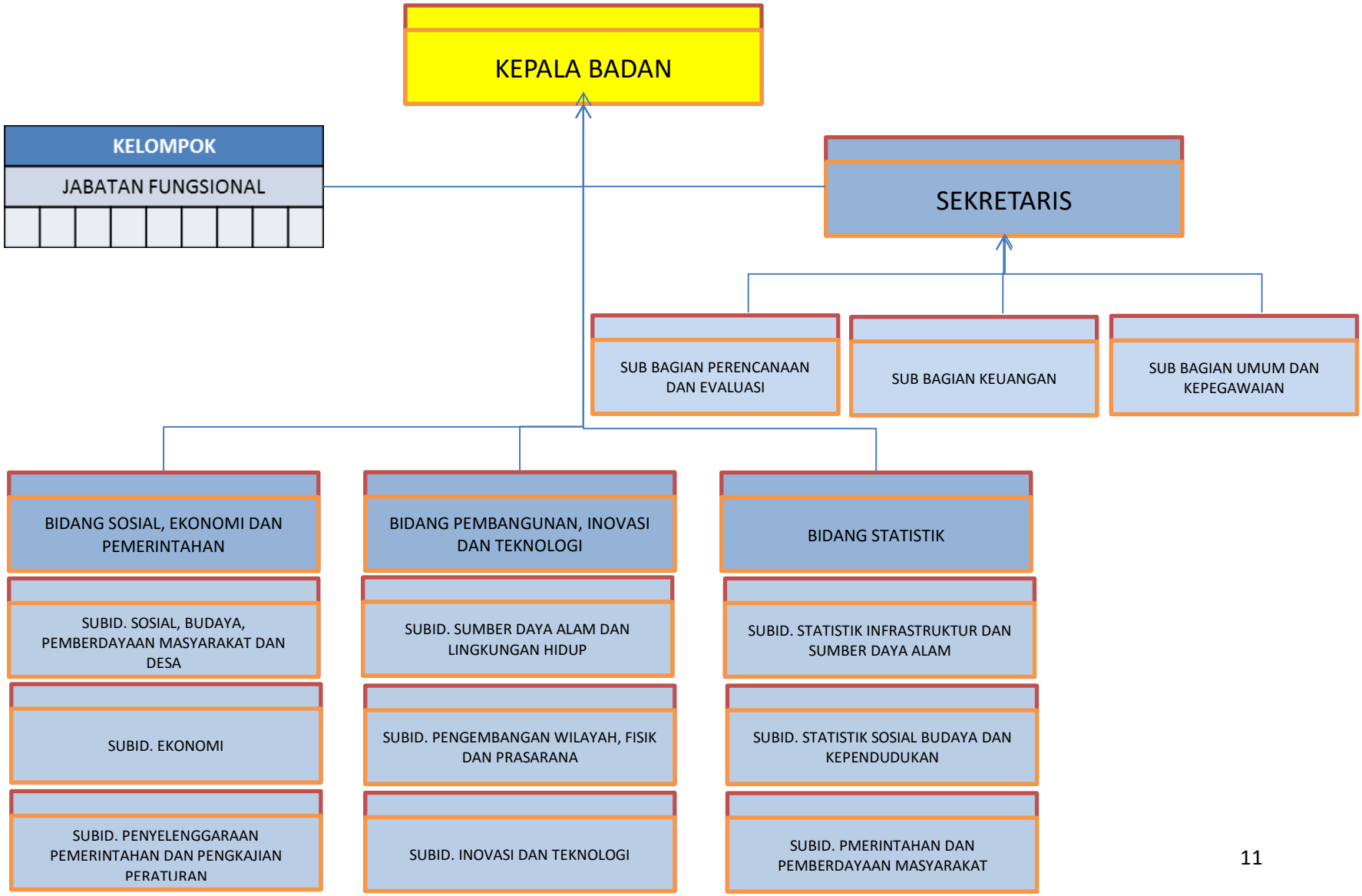
Organisasi Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan;dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2. Sub Bidang Ekonomi;
    3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahkan :
    1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
    3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
e. Bidang Statistik, membawahkan :
    1. Sub Bidang Statistik Infrastruktur danSumber Daya Alam;
    2. Sub Bidang Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan;
    3. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
f. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Peneltian, Pengembanagan Daerah dan Statistik sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA DAN STATISTIK KAB.HALMAHERA UTARA

Sesuai Dengan Perda Nomor : 8 Tahun 2016



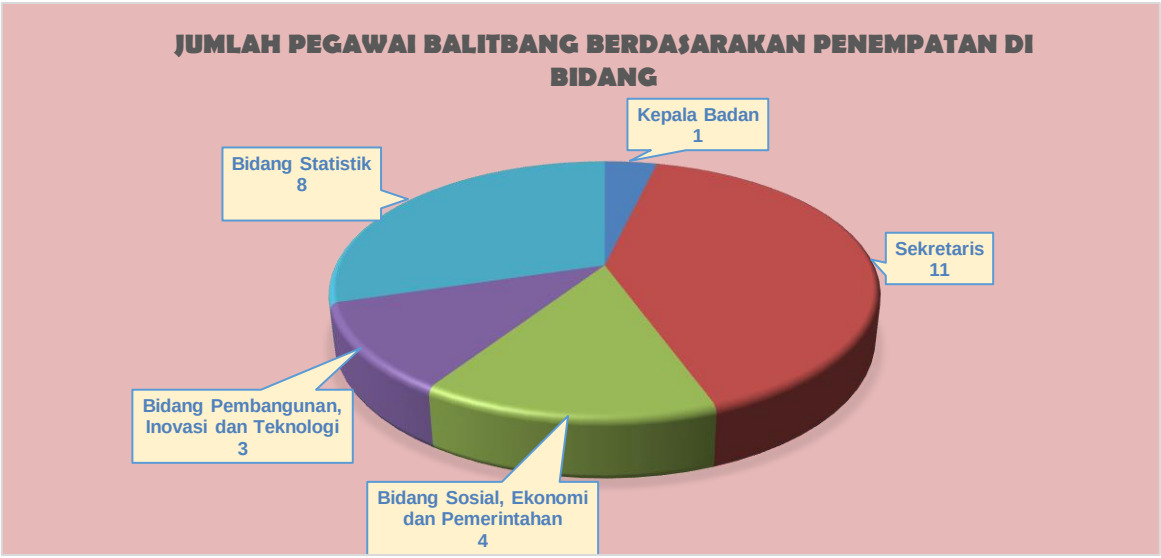
2.2. Sumber Daya Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik

Guna mendukung terselenggaranya tugas pokok Balitbangda & Statistik sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta ketersediaan Data dalam menunjang Pembangunan Daerah, maka Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara, memiliki sumber daya yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sumber daya yaitu sumber daya manusia yang berkaitan dengan ketersediaan aparatur, sumber daya anggaran yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana (asset) yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah menjadi salah satu program prioritas yang penting dan strategis pada saat ini dan di masa yang akan datang.

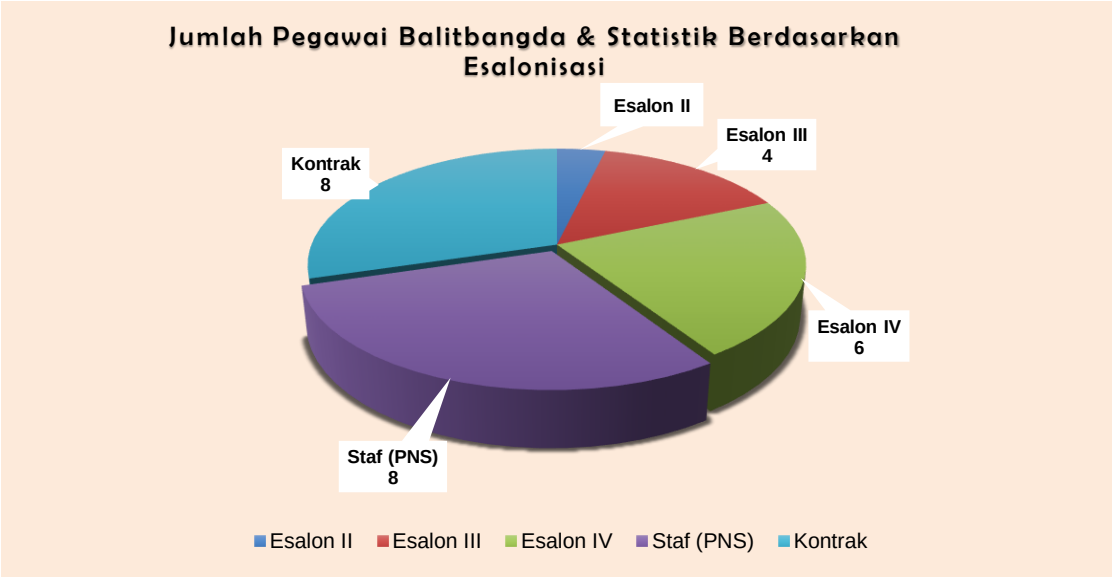
Berikut akan diuraikan kondisi sumberdaya manusia (aparatur) yang merupakan asset utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan eselonisasi, golongan, pendidikan dan jenis kelamin.

Gambar 2.1. Jumlah Pegawai Balitbangda dan Statistik per Bidang



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda & Statistik, 2019

Gambar 2.2.
Jumlah Pegawai Balitbangda & Statistik Berdasarkan Esalonisasi



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbang & Statistik, 2019.

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Balitbangda & Statistik Berdasarkan Esalon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	4	5	11
3.	Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	-	1	2	1	-	4
4.	Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	-	1	1	1	-	3
5.	Bidang Statistik		1	1	3	3	8
J U M L A H		**1**	**4**	**5**	**9**	**8**	**27**

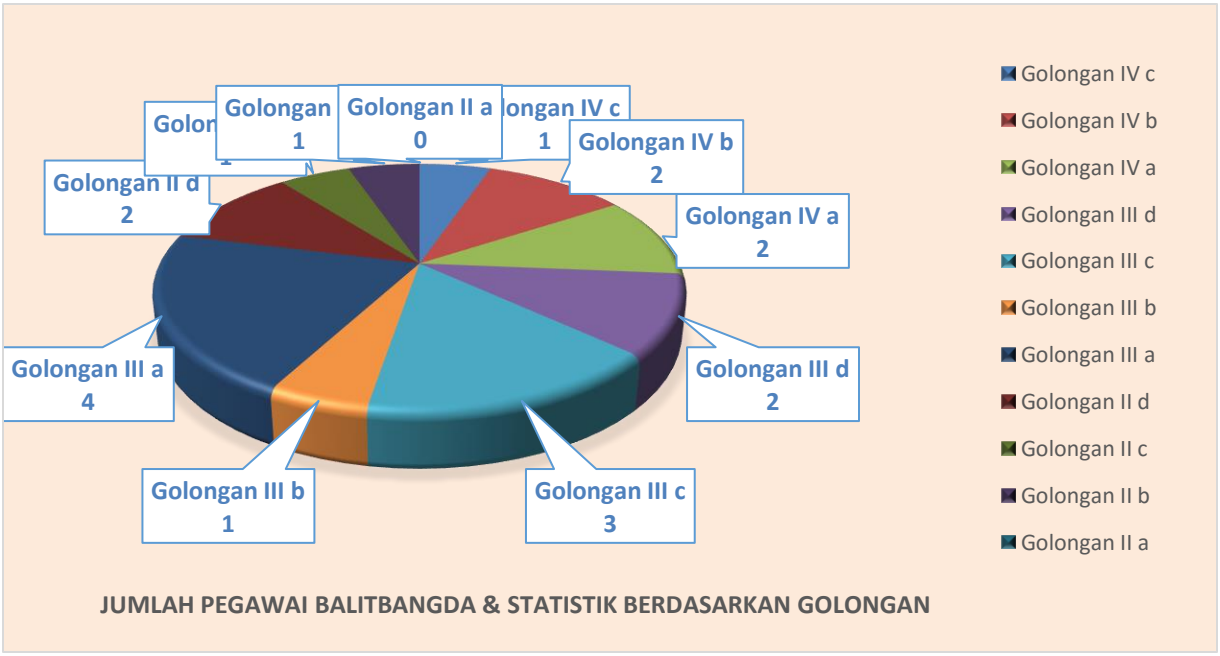
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda & Statistik, 2019

Jumlah aparatur Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik Kabupaten Halmahera Utara sampai pada Perubahan Renstra Balitbangda dan Statistik Tahun 2016 – 2021 ini berdasarkan grafik (2.1 dan 2.2 serta tabel 2.1) yang berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 19 PNS dan 8 kontrak.

Struktur organisasi di balitbangda dan Statistik belum terisi penuh seperti pada pejabat Esalon IV dengan jabatan yang tersedia sebanyak 12 Jabatan namun yang terisi sebanyak 6 Jabatan. Catatan penting yang patut diperhatikan bahwa Balitbangda & Statistik memiliki fungsi paling strategis dalam melakukan koordinasi dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, terkait dengan penelitian dan pengembangan serta ketersediaan data akurat dalam menunjang pembangunan daerah, tetapi fungsi tersebut belum dapat berjalan dengan optimal oleh karena kondisi yang telah dipaparkan diatas. Selain kuantitas

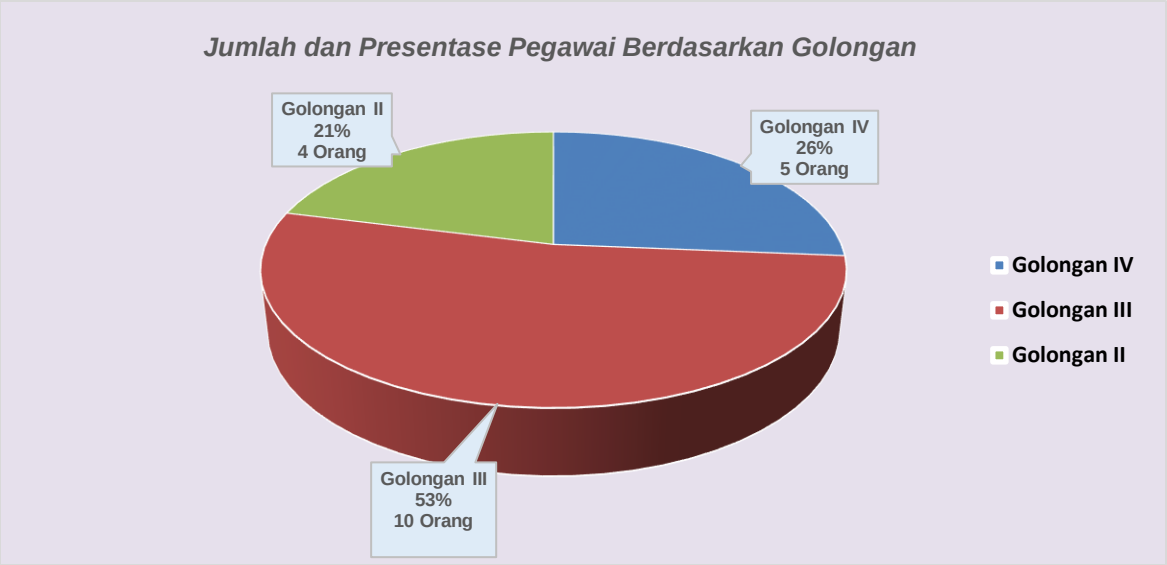
yang perlu dilengkapi, kualitas aparatur juga penting untuk ditingkatkan dalam memenuhi tuntutan regulasi yang ada juga mampu menjawab dinamika yang terus berubah seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan dasar masyarakat yang semakin kompleks serta kemajuan Iptek.

Gambar 2.3.
Jumlah Pegawai Balitbangda & Statistik Berdasarkan Golongan



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian balitbangda & Statistik, 2019

Gambar 2.4.
Jumlah dan Presentase Pegawai Balitbangda & Statistik Per Golongan



Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda & Statistik, 2019

Berdasarkan Grafik 3 dan 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa lebih dari separuh sumber daya aparatur di Balitbang dan Statistik, berada pada golongan III yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 53%, disusul aparatur pada golongan II sebanyak 5 orang atau sebesar 26% dan aparatur golongan IV sebanyak 4 orang atau sebesar 21%.

Dari sisi kesesuaian, kondisi sumber daya aparatur pada golongan IV sudah cukup memadai. Artinya pejabat yang menempati posisi Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat dikatakan memiliki dasar pangkat dan golongan yang sesuai. Namun untuk Golongan III khususnya jabatan Kepala Sub bagian belum sehingga menjadi perhatian khusus yaitu untuk penjenjangan karena keterbatasan sumber daya aparatur.

Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Balitbangda & Statistik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/ SMK	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	2	3	-	-	-	-	1	6
3.	Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	-	-	3	-	-	-	-	1	4
4.	Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	-	1	2	-	-	-	-	-	3
5.	Bidang Statistik	-	1	1	-	-	-	-	3	5
6.	Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)	-	-	5	-	-	-	-	3	8
JUMLAH		**-**	**5**	**14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**27**
PROSENTASE (%)		**-**	**18**	**52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**	**100**

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbang dan Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel 2.2. diatas, dijelaskan bahwa dari 27 PNS terdiri dari (19 PNS dan 8 Tenaga kontrak) dari jumlah sumberdaya aparatur di Balitbangda dan Statistik memiliki latar belakang pendidikan Sarjana merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik kabupaten Halmahera Utara. Hal ini sangat logis mengingat bahwa kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.3.
Kondisi Kepegawaian Balitbangda dan Statistik Berdasarkan Esalon dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Laki – Laki	1	3	4	4	4	16
2.	Perempuan	-	1	1	5	4	11
J U M L A H		**1**	**4**	**5**	**9**	**8**	**27**

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda dan Statistik, 2019

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Balitbangda dan Statistik Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin

No.	Uraian	S2	S1	D3	D2/D1	SMA/SMK	Jumlah
1.	Laki – Laki	5	7	-	-	4	16
2.	Perempuan	-	6	-	-	5	11
J U M L A H		**5**	**13**	**-**	**-**	**9**	**27**

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda dan Statistik, 2019

Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 menggambarkan distribusi sumberdaya aparatur laki-laki dan perempuan baik dilihat dari sisi eselonisasi dan status pegawai maupun dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dari kedua tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sumberdaya aparatur laki-laki berjumlah 16 orang atau sebesar 59 % dan sumberdaya aparatur perempuan berjumlah 11 orang atau sebesar 41 %.

Formasi kepegawaian di Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara masih minim apabila disandingkan dengan Tupoksi Balitbangda dan Statistik sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 serta Anjab/ABK Balitbangda dan Statistik, seperti dirinci pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Kebutuhan Pegawai BALITBANGDA & STATISTIK Berdasarkan Tupoksi

No.	Jabatan	Eselon	Pejabat Struktural sesuai PERBUP 42 / 2016				Staff Pendukung sesuai ANJAB/ABK				Total Jlh Kebutuh-an Pegawai
			Formasi	Terisi	Belum Terisi	Kebutuh–an	Formasi	Terisi	Belum Terisi	Kebutuh–an	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=7+11*
1.	Kepala Badan	II.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	III.a	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kasubag Perencanaan & Evaluasi	IV.a	1	1	-	-	1	-	1	1	1
4.	Kasubag Keuangan	IV.a	1	-	1	1	3	3	-	-	1
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	IV.a	1	-	1	1	2	-	2	2	3
6.	Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan pemerintahan	III.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kasubid Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV.a	1	1	-	-	2	-	2	2	2
8.	Kasubid Ekonomi	IV.a	1	1	-	-	1	-	1	1	1
9.	Kasubid Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	IV.a	1	-	1	1	2	-	2	2	3
10.	Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	III.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kasubid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	IV.a	1	1	-	-	1	-	1	1	1
12.	Kasubid Inovasi dan Teknologi	IV.a	1	-	1	1	1	-	1	1	2
13.	Kasubid Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	IV.a	1	-	1	1	1	-	1	1	2
14.	Kepala Bidang Statstik	III.b	1	1	-	-	-	-	-		-
15.	Kasubid Statistik Infrastruktur dan SDA	IV.a	1	1	-	-	1	-	1	1	1
16.	Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1	-	1	1	1	-	1	1	2
17.	Kasubid Statistik Sosial Budaya dan Kependudukan	IV.a	1	-	1	1	1	-	1	1	2
JUMLAH			**17**	**10**	**7**	***7***	**17**	**3**	**14**	***14***	***21***
Persentase (%)			100	42 %	29 %	*29 %*	100	10 %	45 %	*45 %*	

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda dan Statistik, 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara seperti telah dipaparkan sebelumnya, bahwa jabatan struktural terdiri dari Eselon II.b 1 orang, Eselon III.a 1 orang, Eselon III.b 3 orang dan Eselon IV.a 12 orang dengan total jumlah 17 orang, namun jabatan struktural belum semuanya terisi yaitu pada jabatan Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, KasubBid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kasubid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, Kasubid Inovasi dan Teknologi, Kasubid Statistik Sosial, Budaya dan Kependudukan, Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat) serta Kelompok Jabatan fungsional peneliti belum terisi hingga saat ini.

Selain kebutuhan personil dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya, Balitbangda dan Statistik juga dihadapkan dengan peningkatan Nilai SAKIP yang berkorelasi langsung terhadap pengukuran kinerja pejabat struktural dimana masing-masing pajabat memiliki kinerja terukur dengan target yang diperjanjiakan secara berjenjang dari tiap Eselon. Hal ini penting ditindaklanjuti mengingat pencapian kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Balitbangda dan Statistik yang dicapai melalui kolaborasi tugas dan fungsi masing-masing jabatan secara berjenjang dan sinergis sehingga jabatan struktural yang kosong dan staf penunjang sudah harus diisi dalam mengoptimalkan kinerja Balitbangda dan Statistik ke depan.

2.2.1. Sumber Daya Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan alokasi anggaran mulai dari Tahun 2017 hingga sekarang. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dan serapan atau realisasi anggaran selama 5 Tahun (2017 – sekarang) sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran dan Serapan Anggaran
Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2016 - 2018

No.	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.)	Serapan Anggaran (Rp.)	Prosentase (%)
1.	2016	0	0	0
2.	2017	3.690.229.172,24	3.302.057.578,00	89,48
3.	2018	5.572.914.394,12	4.423.904.363,00	79,38
JUMLAH		**9.263.143.566, 36**	**7.725.961.941,00**	**83,41**

Sumber : Sub Bagian Keuangan Balitbangda dan Statistik, 2019

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa alokasi anggaran Balitbangda dan Statistik hingga tahun 2018 bertambah kurang lebih sebesar 33,78 % dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2017. Kenaikan ini tidak lepas dari semakin meningkatnya Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara serta kompleksitas tugas pokok dan fungsi Balitbangda dan Statistik yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

2.2.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana (Aset)

Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara menempati sebuah kantor baru yang digunakan oleh tiga (3) OPD antara lain : Balitbangda dan Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pemuda dan Olah Raga yang terletak di kawasan Pemerintahan.

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sebagai alat prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang ada pada Balitbangda dan Statistik diperoleh dari hasil pengadaan pada tahun 2017 hingga sekarang, dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Daftar Fasilitas Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Fasilitas	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kantor	1	-	1
2	Mobil Dinas	-	-	-
3	Laptop	8	-	8
4	PC Komputer	4	-	4
5	Printer	6		6
6	Sepeda Motor	4	-	4
7	Meja	20	-	20
8	Kursi	-	-	-
9	Lemari	3	-	3
10	Infokus	4		4
11	Kamera Digital	3		3
12	Memory 32 GB	3		3
13	Tas Kamera	3		3

Sumber : Pengelola Barang (Aset) Balitbangda dan Statistik, 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik sebagaiman Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016, Balitbangda dan Statistik merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan serta ketersediaan data Daerah yang akurat dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu

melaksanakan penelitian yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaran pemerintahan di Daerah.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara yang utama adalah pelayanan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya salah satunya yaitu : a) Urusan Statistik Daerah skala Kabupaten; b) Urusan Penelitian dan Pengembangan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Tahun 2011 - 2015, Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda dan Statistik) Kabupaten Halmahera Utara merupakan bagian dari Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) dengan indikator kinerja sesuai tugas fungsi yaitu : 1). Tersedianya Buku Halut dalam Angka; 2). Tersedianya Buku PDRB Kabupaten; 3). Tersedianya Buku IPM Kabupaten. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi target Renstra BAPPEDA Tahun 2011-2015, dijelaskan sebagai berikut : Untuk urusan statistik Daerah, BAPPEDA telah menyelesaikan penyusunan buku PDRB Halmahera Utara, Daerah Dalam Angka, IPM pada setiap tahunnya dengan capaian 100 % (***Seperti pada Tabel 2.8***).

Tahun 2017 Balitbangda dan Statistik Kab. Halmahera Utara di mekarkan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah. Beberapa kegiatan dilakukan antara lain :

- FGD Kelitbangan di Bidang Sosial Budaya (Permasalahan dan Penanganan HIV dan AIDS di Kab. Halmahera Utara)
- FGD Kelitbangan di Bidang Pemerintahan (Peran Kelitbangan dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara)

- FGD Kelitbangan di Bidang Ekonomi (Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Eceng Gondok)
- Kajian dan Pengembangan Eceng Gondok di Danau Galela Kab. Halmahera Utara
- Kajian di Bidang Sosial dan Budaya (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Halmahera Utara
- Kajian Kualitas Pendidikan di Kab. Halmahera Utara (Kajian Kualitas Pendidikan dasar dan Menengah di Kab. Halmahera Utara)
- Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Kajian Evaluasi Kebijakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di Kab. Halmahera Utara).
- Kajian di Bidang Inovasi dan Teknologi (Penyusunan Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Utara)
- Kajian di Bidang Lingkungan Hidup
- Pendampingan Program Aksi Penanganan Eceng Gondok di Danau Galela
- Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
- Penyusunan dan pengumpulan data statisti daerah

Berdasarkan pencapaian kinerja Balitbangda dan Statsistik Kabupaten halmahera Utara Tahun 2016 – 2018, disimpulkan bahwa target kinerja dengan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam Penerapan Inovasi Daerah telah tercapai sebanyak 8 OPD (25 % dari target 15 % untuk tahun 2018) dan ketersediaan Data Statistik Daerah telah terpenuhi 100 % , namun ada 2 target yang belum tercapai secara maxsimal yaitu terkait dengan rekomendasi hasil kajian yang ditindak lanjuti perangkat daerah dan persentase peningkatan kapasitas ASN Balitbangda dan Statistik hal ini disebabkan akibat keuangan daerah yang tidak stabil sehingga tidak terakomodir dalam penganggaran masing – masing OPD, juga dalam sistim perencanaan setiap OPD masih nampak ego sektoral dalam menentukan program

kegiatannya sehingga rekomendasi Balitangda dan Statistik yang diberikan berdasarakan hasil kajian tidak selalu di tindak lanjuti. Masalah Updating data dalam sisitim juga belum terupdate secara baik karena ketersediaan jaringan dan sisitim ***Satu Data Mantap*** yang juga masih terus di perbaharui.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik (Balitbangda dan Statistik)
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun ke -					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun ke -				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Tersedianya Buku Halut Dalam Angka	**-**	**Ada**	**-**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten	**-**	**Ada**	**-**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.	Tersedianya Buku IPM Kabupaten	**-**	**Ada**	**-**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik

Tantangan pengembangan pelayanan Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Banyaknya acuan regulasi dan kebijakan kelitbangan yang telah mengalami perubahan sehingga mesti dipahami dan menjadi acuan pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Balitbangda yang baru lima tahun ke depan. Acuan regulasi dimaksud, baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kelitbangan antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam kaitan ini, Balitbangda secara otomatis juga dituntut untuk menyediakan berbagai pedoman teknis terkait sebagai bahan kerjakelitbangan.
2. Mengingat statusnya yang masih baru, maka wewenang, tugas dan fungsi Balitbangda dan Statistik belum banyak dipahami oleh para pemangku dan pelaksana kebijakan sehingga dalam membangun jejaring baru dan sinergitas, Balitbangda perlu lebih aktif melakukan konsolidasi dan sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain maupun dengan komponen masyarakat lainnya.
3. Selain hal di atas, Balitbangda dan Statsitik ini tentu masih memiliki banyak keterbatasan, baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana pendukung.
4. Meningkatnya daya saing daerah dan nasional;
5. Keterbatasan pembiayaan/ pendanaan penelitian/kajian/ Analisis,dan penerapan/terapan inovasi;

Sedangakan peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Dukungan kebijakan dan aturan yang jelas antara lain :
   a. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri yang memposisikan diri sebagai induk organisasi kelitbangan seluruh Indonesia;
   b. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya kerjasama antar Kab/Kota Regional Maluku Utara dan mendinamiskan sinergitas global;
3. Peran strategis Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahan, tetapi juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda dan Statistik.

Keberadaan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik merupakan jawaban atas beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif, efisien, tepat sasaran dan belum memberikan manfaat yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Olehnya itu, lembaga ini diharapkan menjadi sumber rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada , atau menjadi rujukan munculnya kebijakan baru, baik itu yang melalui kajian, peneltian, pengembangan dan statisik yang dapat diimplementasikan. Dengan adanya Balitbangda dan Statistik ini, juga diharapkan munculnya inovasi – inovasi baru yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Merujuk pada permasalahan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang tercantum dalam dokumen perubahan RPJMD 2016 – 2021 berdasarkan Tabel T-B.35 sebagai masalah pokok yang sesuai dengan pelayanan Balitbangda dan Statistik, sebagai berikut :

1. ***Belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Governance)***; untuk masalah pokok atau isu strategis ini, Balitbangda dan Statistik berperan penting dalam perumusan, penyusunan dan penyediaan dokumen perencanaan serta fungsi pembinaan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyiapan dokumen perencanaan berjenjang yang selaras dan konsisten.

Isu strategis atau masalah pokok diatas merupakan permasalahan pelayanan Balitbangda dan Statistik yang harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar isu-isu tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya, isu strategis atau masalah pokok maupun

masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Balitbangda dan Statistik

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*)	Belum Optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Secara kelembagaan belum tersedia tenaga peneliti dan perekayasa
			Kurangnya kerja sama yang baik antara instansi riset / universitas yang memiliki komitmen dalam penelitian dan pengembangan
			Sarana dan Prasarana terkait peneliti yang belum tersedia
			Pentingnya peningkatan kualitas SDM apartur tenaga peneliti dan perekayasa
			Belum tersedianya Road Map Balitbangda dan Statistik dalam menunjang program kegiatan
		Belum optimalnya kegiatan penelitian/kajian/ pengembangan yang termanfaatkan	Kegiatan penelitian/ kajian belum sepenuhnya didukung dengan alokasi anggaran
			Hasil kajian yang direkomendasikan belum sepenuhnya di tindak lanjuti perangkat daerah
		Dukungan terhadap pengembangan hasil inovasi daerah tidak maximal	Data base inovasi daerah yang yang belum terinfentarisir secara baik
			Dukungan kelembagaan terhadap inovasi daerah yang tidak optimal
		Belum optimalnya ketersediaan, validasi dan pemanfaatan pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (IT) yang tersusun secara sistimatis, akurat dan terupdate	Pengumpulan data sektoral dari OPD yang belum akurat
			Sistim yang menunjang Satu Data Mantap belum maksimal dan terupdate

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik, yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara adalah ***"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan".***

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

1. ***Pemerintahan yang baik,*** artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat. Pemerintah yang baik juga diwujudkan dengan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah fokus pada program meningkatkan dan menciptakan jiwa kewirausahaan untuk mengurangi kemiskinan. Didukung dengan infrastrutur dasar yang memadai. Sehingga hasil perkebunan dapat langsung didistribusikan dari desa ke pelanggan. Dengan memperbaiki jalan

produksi. Masyarakat juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diperoleh sebagai hasil dari perwujudan pemerintahan yang baik.

2. ***Profesional,*** artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. ***Kebersamaan***, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. ***Berkeadilan***, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggung jawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak *negative* pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan *social*.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan *Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih*
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar
3. Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi Seluruh Warga Masyarakat Dalam Berbagai Aspek Kehidupan
4. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan.

Misi tersebut menjadikan bidang kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi dan sumberdaya manusia sebagai fokus utama.

Pembangunan bidang pemerintahan dengan penerapan nilai-nilai *good governance* dan *clean government* difokuskan pada penataan kelembagaan dan peningkatan layanan publik, peningkatan pelayanan serta sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu dan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan sumberdaya manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membentuk jiwa kewirausahaan serta infrastruktur dasar.

Hasil identifikasi Balitbangda dan Statistik tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Balitbangda dan Statistik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Secara umum tugas Balitbangda dan Statistik terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi Balitbangda dan Statistik berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi I yaitu **"*Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih*"** dimana Balitbangda dan Statistik dalam tugas dan fungsinya melaksanakan Penelitian dan pengembangan serta penyusunan Data Statistik Daerah dalam mewujudkan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda dan Statistik Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan				
No	**Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan di Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	**Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih**			
	Program peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih dengan memanfaatkan hasil Penelitian, Pengembagan dan Satistik	Minimnya kapasitas, kualitas dan pemerataan SDM dalam menunjang kegiatan kelitbangan serta ketersediaan data statistik daerah	Belum adanya Tenaga Fungsional Peneliti dan Perekayasa	Terbukanya kesempatan mengikuti bimtek maupun diklat penelitian dan pengembangan, serta terbukanya peluang kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang kompeten.
			Kurangya kerja sama dengan instansi atau univeristas/ lembaga riset dalam hal penelitian dan pemanfatan hasil penelitian serta pengembangan inovasi daerah	Terbukanya kesempatan kerja sama dalam penerapan hasil – hasil penelitian serta pengembangan inovasi daerah
			Pengumpulan data sektoral serta system pendukung Data Satu Mantap yang belum optimal dan terupdate	Dukungan OPD dalam penyempurnaan data sektoral sistim Satu Data Mantap yang terus akan di perbaharui

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Maluku Utara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan di PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas Laporan kelitbangan	Pentingnya peningkatan Kualitas, kapasitas SDM di Balitbangda dan Satistik	Beluma adanya alokasi anggaran untuk pengadaan tenaga peneliti dan riset	Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mengembangkan Badan Litbang sebagai bagian yang memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan public kepada masyarakat
	Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	Belum adanya media yang dimiliki oleh Badan Libangda dan Statistik Daerah	Sebagai PERANGKAT DAERAH yang baru terbentuk	Pengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan website dan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang dapat mempublikasikan hasil kellitbangan
2	Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri	Belum adanya hasl kelitbangan yang di gunakan sebagai rekomendai kebijakan pemerintah daerah	Perangkat Daerah measih belum memahami tentang fungsi dan keterlibatan litbang dalam memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan	Pemerintah daerah berkomitmen untuk peningkatan pelayanan dan penanganan isu-isu strategis di perlukan rekomendasi hasil kelitbangan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri	sda	sda	sda
3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dukungan terhadap pengembangan hasil inovasi daerah belum optilmal	Data Base Inovasi Daerah yang belum terinventarisasi secara baik	Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Inovasi daerah
	Meningkatnya kualitas implementasi inovasi daerah	sda	Dukungan kelembagaan yang belum optimal	sda
4	Tersedianya kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah	PERANGKAT DAERAH baru belum memiliki regulasi / pedoman penyelenggaraan inovatif daerah	Belum adanya regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah	Pemerintah daerah berkomitmen untuk adanya regulasi / pedoman penyelenggaraan inovasi daerah
5	Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi	Kurangnya kerja sama dengan istansi / lembaga terkait	Sebagai Perangkat Daerah baru belum adanya kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait	Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan kerja sama dengan lembaga / instansi terkait
6	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelitbangan	Tidak tersedia sarana penunjang kelitbangan daerah	Belum tersedianya sarana penunjang kelaitbangan daerah	Secara bertahap akan disediakan sarana penunjang kelitbangan daerah
7	Tersedianya sumber daya manusia fungsional kelitbangan yang kompeten dan profesional	Belum tersedianya tenaga peneliti dan riset di daerah	Kurangnya SDM di bidang kelitbangan di darah	Pemerintah daerah akan mendorong tersedianya SDM dengan melitbatkan PSN dalam pendidikan Penliti dan riset
	Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur kelitbangan	sda	sda	sda

Tabel 3.4
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Balitbangda dan Statistik Terhadap Rensra Badan Litbangda Provinsi Maluku Utara

No	Renstra Badan Litbangda Provinsi Maluku Utara	Permasalahan Pelayanan di PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Belum adanya SDM di badan Litbangda dan Statitik	Beluma adanya alokasi anggaran untuk pengadaan tenaga peneliti dan riset	Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mengembangkan Badan Litbang sebagai bagian yang memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan public kepada masyarakat
2	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Kurangnya SDM di Badan Litbangda	Beluma adanya alokasi anggaran untuk pengadaan tenaga peneliti dan riset	Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mengembangkan Badan Litbang sebagai bagian yang memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan public kepada masyarakat
3	Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Kurangnya kerja sama dengan istansi / lembaga terkait	Sebagai PERANGKAT DAERAH baru belum adanya kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait	Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan kerja sama dengan lembaga / instansi terkait
4	Tersedianya sumber daya manusia fungsional kelitbangan yang kompeten dan profesional Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Belum tersedianya tenaga pneliti dan riset di daerah	Kurangnya SDM di bidang kelitbangan di darah	Pemerintah daerah akan mendorong tersedianya SDM dengan melitbatkan PSN dalam pendidikan Penliti dan riset
5	Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan kebijakan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Belum adanya hasl kelitbangan yang di gunakan sebagai rekomendai kebijakan pemerintah daerah	PERANGKAT DAERAH masih belum memahami tentang fungsi Balitbangda dan Statistik dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah berkomitmen untuk peningkatan pelayanan dan penanganan isu-isu strategis di perlukan rekomendasi hasil kelitbangan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Renstra Balitbangda dan Statistik juga memperlihatkan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program – program Balitbangda dan Statsitik yang akan dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan perekayasaan dan uji teknologi. Pada proses kajian KHLS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga di perlukan mitigasi dari dampak negatit ketidaksesuaianlingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat berupa penerpan AMDAL dn RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, yang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional, maka pasal 2 Perda Nomor 09 Tahun 2012 mengatakan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara bertujuan untuk :***Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kelautan, industri dan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan."***

Salah satu aspek dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah kesesuaian rencana spasial terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara. Rencana dalam RTRW Kabupaten meliputi Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Rencana Kawasan Strategis.

Perencanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam yang perlu menjadi perhatian adalah perencanaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta sumberdaya alam yang berkelanjutan. Merujuk Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah,

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal yaitu peluang dan ancaman serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Bappeda Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencana pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Identifikasi terhadap berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungi pelayanan Balitbangda dan Statstik dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (tantangan) dalam pengembangan pelayanannya yang diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*strength*)
   (1) Memiliki aparatur (SDM);
   (2) Memiliki sarana prasarana pendukung organisasi yang cukup baik dalam menunjang pekerjaan;
   (3) Memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman;
   (4) Memiliki anggaran rutin maupun pembangunan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada;
   (5) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara.

b. Kelemahan (*weakness*)

(1) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumberdaya aparatur peneliti;

(2) Belum optimalnya kegiatan kajain serta ketersediaan data yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai acuan kebijakan pembangunan Daerah

(3) Belum konsistennya sistim penganggaran yang dihasilkan;

(4) Belum optimalnya penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas oleh masing-masing pejabat struktural dan staff di Balitbangda dan Statistik sehingga berpengaruh pada pengukuran capaian kinerja masing-masing aparatur.

3.5.2 Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*opportunity*)

(1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09 Tahun 1012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032 yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan Balitbangda dan Statistik;

(2) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Balitbangda dan Statistik;

(3) Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan Balitbangda dan Statistik;

(4) Adanya komitmen dalam upaya pembenahan kelembagaan.

b. Ancaman (*threats*)

(1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat belum diimbangi dengan sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang memadai;

(2) Globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;

Isu strategis yang berkembang di Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara yaitu :

1. Penyediaan sumberdaya, baik sarana dan prasarana, maupun Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Balitbangda dan Statisik;
3. Peningkatan ketersediaan data yang valid, akurat dan berkualitas, guna menghasilkan dokumen perencanaaan yang berkualitas;
4. Optimalisasi kualitas Penelitian, Pengembangan serta Informasi /Data Statistik Daerah, agar menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Perlu dilakukannya kajian tentang Pengembangan potensi Sumberdaya PAD
6. Dibutuhkannya pengkajian dan pengembangan tentang Sitim Inovasi Daerah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda dan Statistik

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara untuk jangka menengah (2016-2021) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 –2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda dan Statsitik

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kapasitas ASN Balitbang dan Statistik	Persentase kapasitas ASN Balitbangda dan Statistik yang tersedia	Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbang dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Balitbang dan Statistik	30%	50%	75%	85%	100%
2	Meningkatkan rekomendasi hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Badan di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi hasil Penelitian/ kajian di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di Tindak Lanjuti	Meningkatnya Penelitian/Kajian isu - Isu aktual di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Bidang Sosial, ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	0 %	50%	80%	80%	80%

	Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi yang di tindak lanjuti dan Penerapan Sistim Informasi Daerah	Persentase Pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/ kajian dan pengembangan dibidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dan Penerapan Sistim Informasi Daeah	Peningkatan Penelitian/Kajian isu aktual di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi dan Penerapan Sistim Informasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0%	10%	15%	20 %	25%
				Persentase Kebijakan Inovasi yang tetapkan dalam bentuk rekomendasi kepala daerah	0%	50%	50%	50%	50%
	Tersedia Data dan informasi OPD yang baik (Akurasi, Faktual dan Aktual) (SIDa) yang dimanfaatkan untuk Kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan informasi dan Data OPD yang Baik	Penyediaan Data OPD yang Online (Akurat dan Akuntabel) pada bidang data : 1. Data / Dokumen Penduduk 2. Data / Dokumen Pendikan 3. Data / Dokumen Kesehatan 4. Data / Dokumen Infrastruktur 5. Data / Dokumen Sosial Budaya 6. Data / Dokumen Sumber Daya Alam 7. Data PDRB 8. Data Kemisinan 9. Data DDA 10. Data Pertanian 11. Data Kebudayaan dll	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistem	0%	67%	100 %	100 %	100 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halahera Utara dapat dilihat dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Balitbangda dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan				
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arahan Kebijakan**
1	**Tujuan 1 :** Meningkatnya Kapasitas ASN untuk peningkatan Penelitian/Kajian /Analisisi dan Pengembangan di Badan penelitian pengembangan daerah dan statistik	**Sasaran 1.1 :** Peningkatan kapasitas ASN untuk mendukung hasil Penelitian/Kajian /Analisisi / Pengembangan dan statistik	**Strategi 1.1.1 :** Meningkatkan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Balitbangda dan Statistik, meliputi sarana, prasarana, kelembagaan.	**Arahan Kebijakan 1.1.1 :** Penyediaan Fasilitas Pendukung, Kantor dan Laboratorium
			Strategi 1.1.2 : Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara	**Arahan Kebijakan 1.1.2 :** Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dan ASN sebagai tenaga peneliti
2	**Tujuan 2 :** Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian /Analisisi dan Pengembangan di Badan di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	**Sasaran 2.1 :** Peningkatan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan	**Strategi 2..1.1:** Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Sosial dan Budaya	**Arahan Kebijakan 2.1.1:** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Dalam Negeri
			Strategi 2.1.2 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual dalam bidang kesehatan	**Arah Kebijakan 2.1.2 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.3: Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pendidikan	**Arahan Kebijakan 2.1.3:** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Dalam Negeri
			Strategi 2.1.4 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	**Arah Kebijakan 2.1.4 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.5 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Ekonomi	**Arah Kebijakan 2.1.5 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait

			Strategi 2.1.6 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	**Arah Kebijakan 2.1.6 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.7 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Peraturan	**Arah Kebijakan 2.1.7 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 2.1.8 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah	**Arah Kebijakan 2.1.8 :** Mengoptimalkan kerjasama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
3	**Tujuan 3 :** Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian /Analisisi dan Pengembangan di Badan Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi yang di tindak lanjuti dan Penerapan Sistem Informasi Daerah	**Sasaran 3.1 :** Peningkatan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi dan Peningkatkan Penerapan Sistem Informasi Daera (SIDa)	**Strategi 3.1.1 :** Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup.	**Arahan Kebijakan 3.1.1:** Mengoptimalkan kerjsama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 3.1.2 : Meningkatkan Penelitian/Kajian/ Analisis kajian isu aktual di Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	**Arahan Kebijakan 3.1.2 :** Mengoptimalkan kerja sama dengan Univeritas, BPP Pusat dan Kementrian Terkait
			Strategi 3.2 : Meningkatkan Kualitas perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah dan Kebijakan Inovasi yang di terapkan	**Arahan Kebijakan 3.2 :** Peningkatan Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi dan kebijakan inovasi yang di terapkan di daerah
4	**Tujuan 4 :** Tersedia data dan informasi yang baik (Akurasi, Faktual dan Aktual) yang dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah	**Sasaran 4.1 :** Peningkatan Penyediaan data yang akurasi, factual dan akuntabel meliputi data : 1. Data / Dokumen Penduduk 2. Data / Dokumen Pendikan 3. Data / Dokumen Kesehatan 4. Data / Dokumen Infrastruktur 5. Data / Dokumen Sosial Budaya 6. Data / Dokumen Sumber Daya Alam 7. Data PDRB 8. Data Kemisinan 9. Data DDA 10. Data Pertanian 11. Data Kebudaya dan Data lainnya	**Strategi 4.1.1:** Meningkatkan kualiatas penyediaan data yang akurasi, factual dan akuntabel meliputi data : 1. Data / Dokumen Penduduk 2. Data / Dokumen Pendikan 3. Data / Dokumen Kesehatan 4. Data / Dokumen Infrastruktur 5. Data / Dokumen Sosial Budaya 6. Data / Dokumen Sumber Daya Alam 7. Data PDRB 8. Data Kemisinan 9. Data DDA 10. Data Pertanian 11. Data Kebudayan dan Data lainnya	**Arahan Kebijakan 4.1.1:** Mengoptimalkan kerja sama dengan BPS Daerah dan Provinsi

BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, serta langkah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
1.5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
1.10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
1.12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
1.13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi ;

2.1. Pembangunan Gedung Kantor
2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2.3. Sewa Gedung / Kantor

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi** ;

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

3.2. Pengadaan Pakaian Olah raga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan fokus kegiatan;

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.2. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4.3. Bimtek Renstra dan Renja

4.4. Bimtek Adminstrasi dan Kepegawaian

4.5. Bimtek Keuangan

4.6. Studi Referensi Kelitbangan

4.7. Rapat Koordinasi Kelitbangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan fokus kegiatan;

5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

5.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

5.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

5.4. Penyusunan Restra dan Renja SKPD

6. Program Penelitian/Kajian/Analisis dan Pengembangan yang meliputi :

6.1. Koordinasi (FGD) Kelitbangan Bidang Sosial Budaya

6.2. Koordinasi (FGD) Kelitbangan Bidang Pemerintahan

6.3. Koordinasi (FGD) Kelitbangan Bidang Ekonomi

6.4. Kajian dan Pengembangan Eceng Gondok

6.5. Penelitian Kajian di Bidang Sosial dan Budaya

6.6. Penelitian Kajian di Bidang Pengembangan Ekonomi

6.7. Penelitian Kajian Kualitas Pendidikan di Halmahera Utara

6.8. Penelitian Kajian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah

6.9. Penelitian Kajian di Bidang Lingkungan Hidup

6.10. Penelitian Kajian di Bidang Inovasi dan Teknologi

6.11. Kajian dan Penanganan Eceng Gondok

6.12. Penelitian Kajian di Bidang Kesehatan

6.13. Penelitian Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.14. Penelitian kajian di Bidang Pemerintahan
6.15. Penelitian Kajian di Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
6.16. Workhsop Kelitbangan dan Rakerda Kelitbangan Tingkat Provinsi Maluku Utara
6.17. Penelitian Kajian dan Pengembangan di Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.18. Penelitian Kajian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Perundang Undangan
6.19. Penelitian Kajian Isu – Isu Aktual
6.20. Dukungan Teknis dan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.21. Pengembangan Inovasi Daerah
6.22. Fasilitasi Perangkat Daerah dalam Penerapan Inovasi Daerah
6.23. Kebijakan Inovasi Daerah

7. Program Pegembangan Data / Informasi

7.1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kenerja Program dan Kegiatan
7.2. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik
7.3. Penyediaan Sisten dan Pengembangan Data dan Informasi yang Berkualitas (Aktual, Fakta dan Akurat / Sistem Informasi Daerah (SIDA)
7.4. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
7.5. Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB
7.6. Updating*,* Analisis Data Statistik dalam Sistem

PENDANAAN

Untuk lebih lengkap terkait dengan pendaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 (*Terlampir*)

BAB VII
INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA DAN STATISTIK DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Indikator kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021 dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	3
1	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Balitbang dan Statistik	0	30 %	50 %	75 %	85 %	100 %	100%
2	Persentase Hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Bidang Sosial, ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	0	50%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0	0%	10%	15%	10%	25%	70%
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang tetapkan dalam bentuk rekomendasi kepala daerah	0	0%	50%	50%	50%	50%	50%
5	Persentase Data OPD yang terupdate dalam sistim	0	0%	80%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara mengacu secara langsung kepada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Indikator kinerja Utama Balitbangda dan Statistik dapat dilihat pada Tabel di bawah ini ;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kinerja Utama/Outcome /Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan Format Perhitungan	Target Capaian Setiap Tahun					Sumber Data	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya Kapasitas ASN Balitbang dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Balitbang dan Statistik	$\frac{JumlahPeserta\ Peningkatan\ Kapasitas}{Jumlah\ ASN\ Kelitbangan}\ x\ 100\%$	30%	50%	75%	85%	100%		
Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Badan di Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan / Hasil Penelitian/Kajian/ dan Pengembangan Yang Di Tindak Lanjuti	Jumlah Kelitbangan Yang Di Tindak Lanjuti Adalah Hasil-Hasil Kelitbangan (sesuai RENJA Perangkat Daerah Tahun Berkenan) Yang Di Manfaatkan oleh Para Pemangku Kepentingan $\frac{Jumlah\ Hasil\ Kelitbangan\ Yang\ Di\ Tindak\ Lanjuti}{Jumlah\ Hasil\ Kelitbangan\ Di\ Tahun\ Bersangkutan}\ x\ 100\%$	0%	50%	80%	80%	80%	Data Balitbang dan Statistik	Kepala Badan dan KABID Sosial, Budaya, Ekonomi dan Pemerintahan

Meningkatnya rekomendasi hasil Penelitian/Kajian dan Pengembangan di Badan Pembangunan, Inovasi dan Teknolgi yang di tindak lanjuti dan Penerapan Sistim Informasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi dan Teknologi	$\frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ Yang\ Di\ Fasilitasi}{Jumlah\ Total\ Perangkat\ Daerah}\ x\ 100\%$	0%	10%	15%	20%	25%	Data Balitbang dan Statistik	Kepala Badan dan Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi
	Persentase Kebijakan Inovasi yang tetapkan dalam bentuk rekomendasi kepala daerah	$\frac{Jumlah\ Kebijakan\ Inovasi\ Yang\ Di\ Terapkan}{Jumlah\ Inovasi\ Yang\ Di\ Usulkan}\ x\ 100\%$	0%	50%	50%	50%	50%	Data Balitbang dan Statistik	Kepala Badan dan Kepala Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi

Tersedianya Data Statistik OPD	Persentase Data OPD yang Terupdate dalam Sistem	$\frac{Jumlah \text{ Data OPD yang Terupdate dalam Sistim}}{Jumlah\ OPD}$ Ket : Data / Dokumen Penduduk Data / Dokumen Pendikan Data / Dokumen Kesehatan Data / Dokumen Infrastruktur Data / Dokumen Sosial Budaya Data / Dokumen Sumber Daya Alam Data PDRB Data Kemiskinan Data DDA Data Pertanian Data Kebudayaan Dan data lainnya Jika Di Perlukan (Pendekatan : Survey Kepuasan by Webserver dan Manual)	0%	80%	100%	100%	100%	Data OPD	Kepala Badan dan Kabid Statistik

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operatif yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021.

Dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dokumen perencanaan tahunan. Selain hal tersebut, Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tobelo, Juli 2019

Kepala Badan
Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik
Kabupaten Halmahera Utara

ATBERNIMUS PASIMANYEKU, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 196911191997021002